Yogyakarta Akan Lanjutkan Layanan Vaksinasi di Malioboro

YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta akan tetap melanjutkan layanan vaksinasi di tempat umum, salah satunya yang sudah dilakukan adalah di Malioboro pada akhir pekan.

"Kami siapkan 100 dosis vaksin untuk layanan di Malioboro. Namun pada akhir pekan lalu baru diakses oleh 33 orang. Bisa siapa saja, tidak terbatas kependudukan," kata Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Senin (26/10).

Dari 33 dosis vaksin yang diberikan, sebanyak 17 untuk penerima dosis pertama dan 16 untuk penerima dosis kedua. Vaksin yang disediakan adalah Sinovac.

Menurut Heroe, layanan vaksinasi di Malioboro tersebut dibuka selama dua jam setiap akhir pekan "Tidak terbatas KTP. Bisa diakses juga oleh wisatawan dari luar daerah," katanya.

Selain layanan vaksinasi, Satgas Penanganan COVID-19 Yogyakarta juga melakukan tes acak COVID-19 dengan metode rapid test antigen untuk wisatawan yang ada di kawasan Malioboro.

"Pada akhir pekan lalu, hanya ada lima yang mengikuti tes acak ini. Semuanya dinyatakan negatif," katanya.

Heroe pun akan mengubah strategi tes acak antigen tersebut menjadi sore hari atau saat puncak kunjungan wisatawan di kawasan Malioboro.

"Kemarin kami melakukan pada pagi hari, jadi belum banyak wisatawan yang datang. Ada juga yang menolak," katanya.

Heroe menambahkan, vaksinasi dan tes acak antigen tersebut menjadi bagian dari upaya Kota Yogyakarta untuk memastikan wisatawan yang berkunjung dalam kondisi sehat.

"Perekonomian sudah mulai bangkit. Makanya, kami pun ingin menjaga agar perekonomian terus bergerak tetapi warga dalam kondisi sehat," katanya.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranawa Eryana menyarankan agar Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan layanan vaksinasi di tempat umum, seperti tempat wisata, stasiun hingga terminal. "Saya kira, akan bisa menarik minat wisatawan untuk datang ke Yogyakarta karena selain berwisata juga bisa sekalian menjalani vaksinasi," katanya. **(ANTARA)**

ANTARA/Hery Sidik

Ilustrasi - Vaksinasi COVID-19 bagi mahasiswa Nusantara di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang difasilitasi Tim Velox Et Exactus BIN, Senin (25/10).

Menko Marves:

Presiden Jokowi Minta Harga Tes PCR Turun Jadi Rp 300 Ribu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar harga tes PCR turun menjadi Rp 300 ribu menyusul kewajiban penggunaan tes PCR untuk syarat moda transportasi pesawat yang mendapatkan banyak kritikan belakangan ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers hasil rapat terbatas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipantau secara daring dari Jakarta, Senin (25/10), mengatakan masa berlaku tes pun diminta Presiden untuk diperpanjang.

"Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300 ribu dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," katanya.

Luhut menjelaskan, kewajiban penggunaan PCR yang dilakukan pada moda transportasi pesawat ditujukan utamanya untuk menyeimbangkan relaksasi yang dilakukan pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor pariwisata.

Ia menuturkan, meski saat ini kasus nasional sudah rendah, Indonesia tetap harus memperkuat 3T dan 3M supaya kasus tidak kembali meningkat, terutama

menghadapi periode libur Natal dan Tahun Baru. Hal itu juga dilakukan sebagaimana pelajaran yang diambil dari pengalaman negara-negara lain. "Secara bertahap penggunaan tes PCR akan juga diterapkan pada transportasi lainnya selama dalam mengantisipasi periode Natal dan Tahun Baru," ujarnya.

Sebagai perbandingan, selama periode Natal dan Tahun Baru lalu, meskipun penerbangan ke Bali disyaratkan PCR, mobilitas tetap tercatat meningkat. Luhut juga mengemukakan peningkatan mobilitas itu pada akhirnya mendorong kenaikan kasus, walaupun tanpa adanya varian delta.

"Dapat kami sampaikan bahwa mobilitas di Bali saat ini sudah sama dengan Nataru tahun lalu, dan akan terus meningkat sampai akhir tahun ini, sehingga meningkatkan risiko kenaikan kasus," katanya.

Mobilitas penduduk yang meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir, menurut Luhut, juga jadi pertimbangan pemerintah untuk menerapkan kebijakan PCR. Meski kasus dan level PPKM telah turun, hal itu tidak boleh melonggarkan kewaspadaan.

Luhut menegaskan, pemerintah belajar dari banyak negara yang melakukan relaksasi aktivitas masyarakat dan protokol kesehatan, namun kemudian kasusnya meningkat pesat meskipun tingkat vaksinasi mereka jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Contohnya seperti Inggris, Belanda, Singapura dan beberapa negara Eropa lainnya. "Anda bisa Google apa yang terjadi di rumah sakit di Glasgow, berapa persen kenaikan di Roma, kenaikan di Belanda. Ini kita belajar, jadi saya mohon jangan kita lihat enaknya karena kalau lihat enaknya kita rileks berlebihan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga pernah memerintahkan penurunan harga tes PCR yang sebelumnya berkisar di harga Rp 1 juta turun menjadi Rp 495 ribu hingga Rp 525 ribu. **(ANTARA)**

Presiden: Vaksinasi Massal dan Prokes Upaya Maksimal Akhiri Pandemi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan vaksinasi COVID-19 secara massal dan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes) menjadi upaya maksimal bangsa dalam mengakhiri masa pandemi.

"Saat pandemi baru saja menjangkau Indonesia tahun lalu, pemerintah bergerak mencari jalan untuk mendapatkan vaksin yang bahkan masih dalam penelitian," kata Presiden Jokowi melalui unggahan di akun resmi @jokowi dipantau di Jakarta, Senin (26/10).

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah sudah sejak awal berupaya untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Alhasil, ketika vaksin COVID-19 diluncurkan oleh beberapa perusahaan farmasi dunia, Pemerintah Indonesia sudah mendapatkan komitmen untuk pengadaan vaksin.

ANTARA/HO/Humas Pemprov Kalsel/aa.

Presiden Joko Widodo dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di RSUD Ansyari Saleh Banjarmasin.

Per Senin, ratusan juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku dan jadi telah didapatkan Indonesia. Perolehan vaksin itu melalui kerja sama langsung, kerja sama dengan lembaga dunia, maupun bantuan dari negara sahabat. "Vaksin-vaksin itu didistribusikan ke seluruh negeri untuk seluruh rakyat yang perlu kita lindungi," ujarnya.

Dalam unggahannya pada Senin kemarin, Presiden Jokowi memperlihatkan data perolehan vaksin COVID-19 oleh Indonesia hingga 4 Oktober 2021, yakni 280.527.920 dosis. Jika dirinci sebanyak 219.676.280 dosis merupakan vaksin Sinovac, 28.190.720 vaksin AstraZeneca, 8.450.000 vaksin Sinopharm, 8.000.160 vaksin Moderna, dan 15.710.760 vaksin Pfizer.

Adapun hingga Minggu 24 Oktober 2021, menurut Satgas Penanganan COVID-19, Indonesia telah menyuntikkan dosis pertama vaksinasi COVID-19 kepada 113.032.768 penerima, dosis kedua vaksin COVID-19 kepada 67.915.440 penerima, dan dosis ketiga vaksin COVID-19 kepada 1.102.824 penerima. **(ANTARA)**

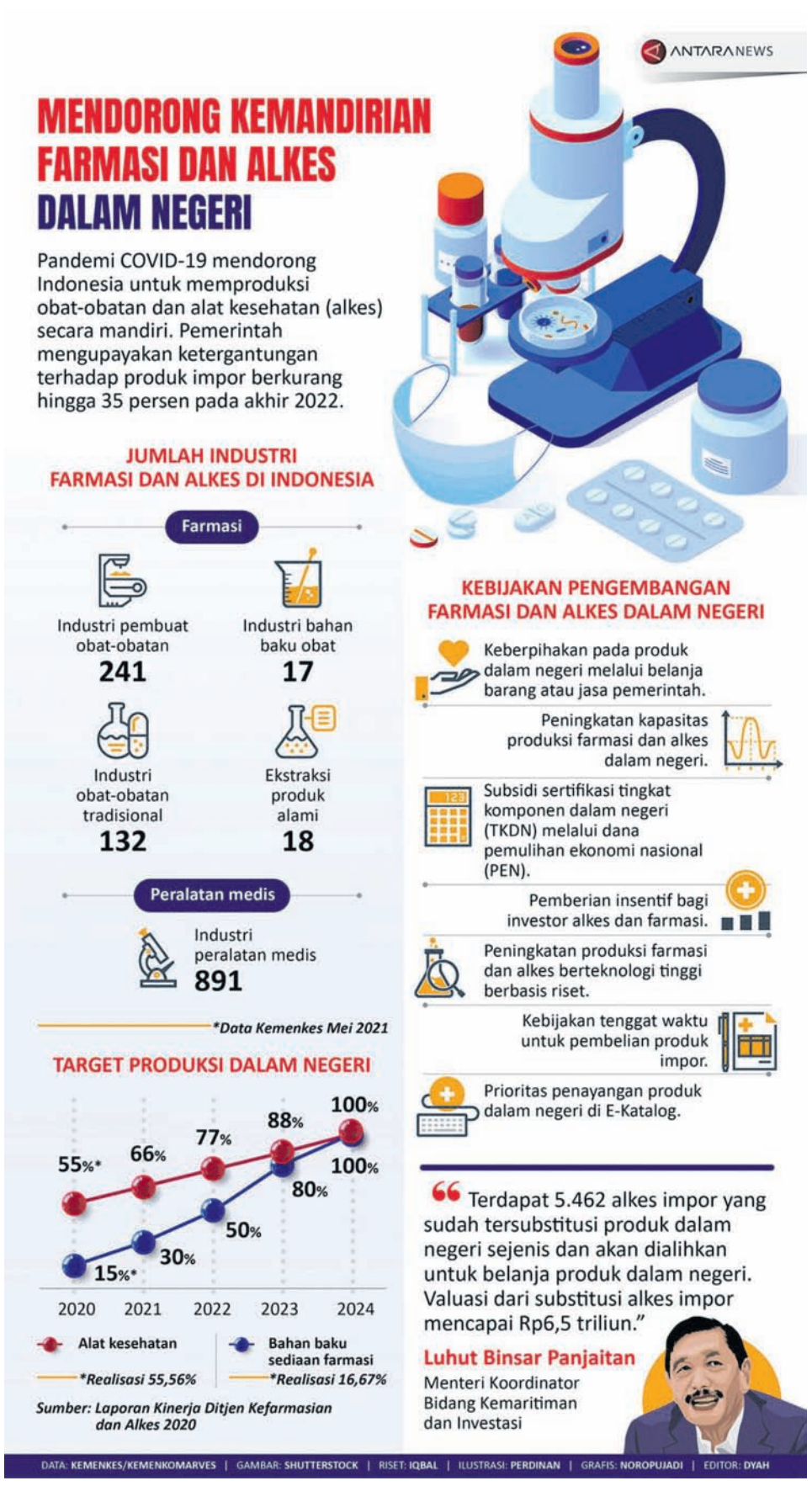

Disdikpora Kulon Progo Usulkan Uji Sampel Usap PCR Siswa SMP

KULON PROGO - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengusulkan adanya uji sampel usap PCR kepada siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka.

"Kami sudah mengusulkan kepada Dinas Kesehatan Kulon Progo agar dilakukan uji sampel usap PCR di sekolah jenjang SMP maupun SD untuk memastikan bahwa PTM berjalan lancar, taat protokol kesehatan," kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo Arif Prastowo di Kulon Progo, Senin (26/10).

Ia mengatakan total sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) di Kulon Progo untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 62 dari total 65 SMP, sedangkan jenjang SD sebanyak 260 dari 338 SD.

Menurut dia, sekolah yang diusulkan untuk uji sampel, yakni sekolah yang berada di wilayah perkotaan, terlebih, sekolah yang jumlah muridnya tidak sedikit.

ANTARA/Sutarmi

Kepala Disdikpora Kulon Progo Arif Prastowo.

Pengawasan protokol pencegahan penularan COVID-19 di sekolah yang berada di wilayah perkotaan memang tidak mudah, seperti SMP Negeri 1 Wates, SMP Negeri Pengasih, SMP unggulan, SD Negeri Brosot, SD Negeri 4 Wates. "Kami prioritaskan untuk sekolah yang berada di zona kuning," kata Arif.

Arif menyerahkan sepenuhnya jadwal pelaksanaan uji sampel swab dengan menggunakan metode PCR di sejumlah sekolah kepada Dinas Kesehatan Kulon Progo sebagai leading sektor penanganan pandemi COVID-19. "Semoga dapat segera dilaksanakan uji sampel usap PCR bagi sekolah yang melaksanakan PTM," harapnya.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kulon Progo Fajar Gegana mengatakan pihaknya berupaya mengantisipasi penularan COVID-19 di lingkungan sekolah yang mampu menimbulkan potensi klaster COVID-19. "Masing-masing sekolah yang telah mendapatkan izin untuk menggelar PTM diharapkan melakukan asesmen kepada tenaga pendidik maupun siswa secara aktif," katanya.

Ia mengatakan upaya mengantisipasi terjadinya penularan COVID-19 di lingkungan sekolah menjadi prioritas utama dari gugus tugas penanganan COVID-19 Kulon Progo. "Kami mengharapkan agar sekolah mampu melakukan pengawasan terhadap kondisi kesehatan siswa maupun tenaga pengajar," katanya. **(ANTARA)**

Wali Kota Pekalongan Minta Warga Tetap Taat Prokes Meski Kasus COVID-19 Sudah Nol

PEKALONGAN - Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid meminta warganya tetap taat protokol kesehatan (prokes) meski angka kasus penularan COVID-19 tercatat sudah nol.

"Kota Pekalongan sudah nol kasus COVID-19 dan kegiatan pun sudah berjalan normal. Akan tetapi, kita tidak boleh lengah maupun abai menerapkan prokes," katanya di Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (26/10).

Menurut dia, pemerintah kota dan gugus tugas penanganan COVID-19 saat ini fokus menyiapkan strategi untuk mempercepat penuntasan pelaksanaan vaksinasi. "Saat ini pencapaian vaksinasi sudah mencapai sekitar 67 persen dan akan terus ditingkatkan," katanya.

Afzan mengatakan bahwa Kota Pekalongan masih berada di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 karena cakupan vaksinasinya masih tergolong rendah.

"Kami mengajak warga yang belum vaksinasi agar segera melakukannya agar pencapaian target vaksinasi bisa terlampaui," katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan Dimas Arga Yudha mengungkapkan bahwa sejak awal September 2021 hingga Oktober 2021 petugas BPBD tidak memakamkan satu pun jenazah penderita COVID-19.

Menurut dia, kematian akibat COVID-19 paling banyak terjadi pada Juli 2021, ketika dalam satu hari petugas BPBD dalam sehari bisa memakamkan sampai 13 orang yang meninggal dunia akibat COVID-19.

Dimas mengimbau warga agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak) agar terhindar dari serangan COVID-19. **(ANTARA)**